

PENGELOLAAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA BANJIR : STUDI KASUS TANGGAP DARURAT BENCANA DI KOTA KENDARI TAHUN 2017

Nasrullah¹, Eko Teguh Paripurno², Johan Danu Prasetyo³

^{1,2,3})Magister Manajemen Bencana, Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
E-mail: nasrullah.olan@gmail.com¹

ABSTRAK

Salah satu unsur atau elemen utama suatu aktivitas penanggulangan bencana khususnya kegiatan pada massa tanggap darurat bencana dapat berjalan dengan efektif dan baik dapat dilihat dari pelaksanaan sistem manajemen logistik bendananya. Penanganan bencana dalam hal distribusi logistik selalu menghadapi permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini tampak pada kasus bencana banjir di Kota Kendari pada Bulan Mei tahun 2017 lalu yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan distribusi bantuan logistik bencana, seperti sering terjadinya kelebihan stok barang untuk kebutuhan yang tidak mendesak, kurang meratanya distribusi bantuan kepada korban bencana dan lambannya pendistribusian bantuan kepada korban terdampak bencana. Bantuan Logistik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana. Dukungan bantuan logistik tersebut harus tepat waktu, sasaran, lokasi, jumlah, kualitas dan sesuai dengan kebutuhan korban bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur yang dapat diproses dengan cepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin pelayanan publik agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik.

Hal ini terjadi disebabkan karena lemahnya penatakelolaan pendistribusian bantuan pada saat keadaan darurat bencana. Pentingnya manajemen atau tata kelola pendistribusian bantuan pada saat keadaan darurat bencana, menuntut adanya harmonisasi dan koordinasi dari berbagai aktor yang ikut terlibat dalam pendistribusian bantuan bencana. Selain adanya harmonisasi dan koordinasi dari berbagai aktor tersebut, pendistribusian bantuan juga harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan pendistribusian bantuan logistik korban bencana alam di Kota Kendari pada saat tanggap darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan bencana banjir pada saat tanggap darurat di Kota Kendari sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari proses perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana operasi. Pengorganisasian dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial Kota Kendari, BPOM, SATPOL PPserta TNI/POLRI. Pada proses pelaksanaannya, ada koordinasi secara rutin yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Pemda Kota Kendari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial Kota Kendari, BPOM, SATPOL PP serta TNI/POLRI. Proses evaluasi oleh Pemda Kota Kendari dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berjalan rutin.

Kata Kunci: Manajemen logistik, Tanggap Darurat, Bencana Banjir

ABSTRACT

One of the main components or elements of a disaster management activity, especially disaster response activities can run well and effectively can be seen from the implementation of the disaster logistics system. Disaster management in terms of logistics distribution always

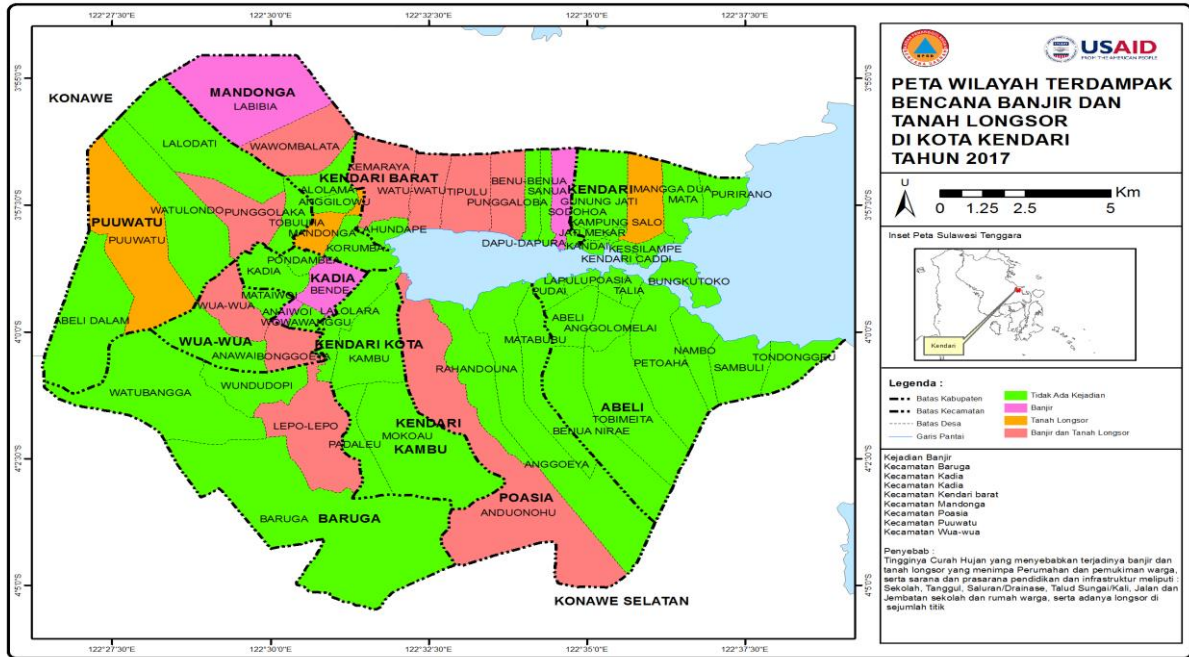
faces very complex problems. This can be seen in the case of the flood disaster in Kendari City in May 2017 which showed the weak implementation of the distribution of disaster logistical assistance, such as the frequent occurrence of excess stock of goods for non-urgent needs, lack of equitable distribution of aid to victims and the slow distribution of aid to affected victims disaster. Logistics assistance is needed in disaster management, especially when a disaster occurs. The logistical support must be on time, target, location, quality, quantity, and according to the needs of the victim. Therefore we need procedures that can be processed quickly, precisely, can be accounted for and ensure that public services are well channeled. This happens because of the weak management of the distribution of aid during a disaster emergency. The importance of the governance of the distribution of aid during a state of disaster emergency requires the harmonization and coordination of various actors involved in the mechanism for the distribution of disaster relief. In addition to the harmonization and coordination of these various actors, the distribution of aid must also meet the Standard Operating Procedures (SOP). The aim of this research is to analyze and describe the management of the distribution of logistical assistance to victims of natural disasters in the city of Kendari during the emergency response. The results showed that the management of flood disaster relief during the emergency response in Kendari City was quite good. This can be seen from the planning carried out by preparing the operating plan. The organizing was carried out by Kendari City Government, Regional Disaster Management Agency (BPBD), Kendari City Social Service, BPPOM, SATPOL PP and TNI / POLRI. In the implementation, there are routine coordination of related parties such as Kendari City Government, Regional Disaster Management Agency (BPBD), Kendari City Social Service, BPPOM, SATPOL PP and TNI / POLRI. The evaluation process by the Kendari City Government and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) runs regularly.

KeyWords: *Logistics management, Emergency Response, Flood Disaster*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keadaan alam yang sangat beragam. Secara geografis dan struktur geologi, Indonesia terletak pada suatu kawasan rawan terjadi bencana, baik bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, letusan gunung berapi dan badai maupun bencana non alam seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit dan karhutla. Dengan demikian untuk menanggulangi terjadinya bencana, pemerintah telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk di tingkat Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) pada tingkat pusat. (Zaroni, 2017)

Kondisi geologi dan letak geografi Indonesia menyebabkan menjadi salah satu Negara yang sangat berpotensi sekaligus rawan akan terjadinya bencana baik itu bencana gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, badai dan letusan gunung berapi. Jenis bencana tersebut disebabkan keadaan geologi Indonesia sangat unik, yaitu terletak di antara dua lempeng benua yang selalu bergerak. (Sukandarrumidi, 2010). Negara Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tergolong tinggi. Hampir setiap tahun Indonesia terjadi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam. Diantara berbagai jenis bencana alam yang ada di Indonesia, kejadian bencana banjir masih mendominasi dibandingkan dengan bencana lainnya. (Sahilala, Sarwono dan Hanafi, 2015). Bencana banjir menimbulkan banyak kerugian baik kerugian lingkungan, korban jiwa, kerugian harta benda hingga dampak psikologi dari korban bencana tersebut.



Gambar 1. Peta Wilayah Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Kendari

Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah yang sangat tinggi potensi terjadinya bencana banjir setelah kebakaran. Berdasarkan data historis bencana dari DIBI-BNPB sejak tahun 1999 sampai dengan 2016 tercatat bahwa kejadian bencana banjir di Kota Kendari sebanyak 19 kejadian, sedangkan kasus kebakaran sebanyak 29 kejadian, tanah longsor 14 kejadian, sedangkan jenis bencana lain berada pada 1-5 kasus saja. (Kasim, 2017). Berdasarkan data tersebut Kota Kendari sebagai salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana banjir dengan tingkat potensi bencana yang tinggi. Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilanda banjir setiap tahunnya. Kejadian bencana banjir tahun 2017 berasal dari luapan sungai dan menggenangi 9 Kecamatan yang menimbulkan 1 korban jiwa dan 2 korban luka. Selain itu banjir juga menggenangi rumah masyarakat sejumlah 3.369 kepala keluarga (KK) atau 9.958 jiwa terdampak, 2.564 rumah rusak ringan, 438 rumah rusak sedang, 14 rumah rusak berat dan 55,5 Ha lahan pertanian terendam, sehingga kejadian bencana tersebut menimbulkan kerugian materi sebanyak 65.180.542.500,00. (BPBD Kota Kendari, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa bencana banjir mendatangkan kerugian yang begitu besar dan korban jiwa bagi masyarakat terdampak. Untuk mengurangi risiko dari dampak bencana yang ditimbulkan maka perlunya pengelolaan atau manajemen bencana.

KERANGKA TEORETIK

Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (UU No. 24 Tahun 2007). Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap kelompok rentan;

dan f) pemulihan dengan segera prasaran dan sarana vital. (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 tentang Penanggulangan Bencana).

Menurut Nurjanah dkk, (2013) manajemen kedaruratan mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk: (1) mencegah bertambah besarnya jumlah korban dan kerusakan/kerugian; (2) meringankan penderitaan; (3) stabilitas kondisi/pengungsi; (4) mengamankan aset vital atau fasilitas kunci; (5) menyediakan pelayanan dasar dalam penanganan pasca darurat; (6) meringankan beban masyarakat setempat; (7) dalam memenuhi kebutuhan dasar selama darurat, perlu diperhatikan hak-hak kelompok rentan (orang jompo, ibu hamil, balita, orang sakit, orang cacat, usia lanjut dan juga kelompok bermarjinalkan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan pasal 28 ayat 1 bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandan, air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan. Menurut Badri (2008) bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, perlindungan, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Pemerintah daerah dan pusat berkewajiban untuk memberikan bantuan terhadap korban bencana untuk meringankan beban penderitaan bagi para korban. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan baik itu dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), bantuan dunia usaha, bantuan dari masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri. Manajemen Bencana diperlukan untuk mencegah dan mengurangi risiko serta kerugian yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi, baik berupa korban jiwa manusia, kerugian harta benda hingga dampak psikologi.

Menyikapi adanya bencana alam tersebut, maka perlu adanya mekanisme yang berfungsi untuk melindungi korban bencana tersebut khususnya pada masa keadaan tanggap darurat bencana. Dalam kondisi keadaan darurat bencana, masyarakat sangat memerlukan bantuan dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, swasta ataupun perorangan. Bantuan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat korban bencana adalah bantuan logistik. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pokok masyarakat, berupa sandang, pangan dan papan seperti sembako, mie instant, makanan siap saji, susu, air bersih, selimut, obat-obatan dan lainnya.

Penyeragaman mekanisme dalam penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat di Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu, dan akuntabel agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan dikoordinasikan dalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diwakili oleh BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana. Hal ini supaya memudahkan akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, pengadaan barang/jasa, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas uang dan/atau barang, serta penyelamatan.

Salah satu elemen atau unsur utama suatu aktivitas penanggulangan bencana khususnya dalam kegiatan tanggap darurat dapat berjalan dengan baik dan efektif dapat dilihat dari pelaksanaan sistem logistik bencananya. Pendistribusian bantuan logistik dalam penanganan bencana pada saat tanggap darurat selalu menghadapi permasalahan yang sangat kompleks

dan beragam. Hal ini tampak pada kejadian bencana banjir di Kota Kendari pada bulan Mei tahun 2017 yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan distribusi bantuan logistik korban bencana, seperti kurang meratanya distribusi bantuan kepada korban, lambannya pendistribusian dan terjadinya kelebihan stok barang tertentu untuk kebutuhan yang tidak mendesak.

Penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana bantuan logistik sangat diperlukan. Dukungan bantuan logistik tersebut harus tepat waktu, sasaran, lokasi, kualitas, jumlah, dan sesuai kebutuhan korban. Menurut informasi yang dilansir Inilahsultra.com sebagian besar korban bencana banjir kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak korban mengalami gatal-gatal, demam, sakit kepala, dan panas disebabkan oleh cuaca dingin, makanan tidak teratur dan kekurangan air bersih. Sementara, bantuan pemerintah berupa air minum dan air bersih terbatas, kapasitas tenda tidak memadai dan tidak mampu menampung keluarga korban. Menurut salah seorang pengungsi, Ibu Eka mengatakan, ada puluhan kepala keluarga masih berada di tenda pengungsian. Mereka masih enggan mengosongkan tenda karena khawatir terjadi banjir susulan. Mereka takut nanti tiba-tiba datang banjir susulan. Apalagi cuaca tidak mendukung saat ini, hal ini untungnya masih ada pihak swasta yang turun memberikan bantuan berupa indomie dan telur. Sedangkan petugas BPBD dalam implementasinya menyampaikan bahwa setiap adanya permintaan bantuan dari pemerintah desa atau kecamatan, BPBD selalu memberikan bantuan. Pemberian bantuan tersebut sesuai permintaan dengan melihat ketersediaan stok barang yang ada. tidak adanya permintaan bantuan yang melebihi stok barang yang ada, menunjukkan bahwa bantuan yang tersedia sangat mencukupi. Namun kondisi yang terjadi masyarakat mengalami kekurangan bantuan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan lemahnya pengelolaan tanggap darurat bencana pada saat kondisi abnormal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencanabanjir di Kota Kendari pada saat tanggap darurat? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan distribusi bantuan logistik bagi korban bencana banjir di Kota Kendari pada saat tanggap darurat.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar memperoleh informasi yang lengkap dalam memberi gambaran tentang masalah penelitian dan pemecahannya, yakni pengelolaan bantuan logistik bencana banjir Kota Kendari Tahun 2017 pada saat tanggap darurat. Fokus penelitian ini yaitu mengidentifikasi pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencana banjir di kota kendari tahun 2017 pada saat tanggap darurat. Dengan memberikan gambaran terhadap aktor-aktor atau *stakeholders* yang ikut terlibat dalam pengelolaan logistik bantuan bagi korban pada saat tanggap darurat bencana banjir di kota kendari tahun 2017.

Penelitian ini di laksanakan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pemilihan lokasi di Kota Kendari sebagai tempat penelitian karena di Daerah tersebut dalam pengelolaan bantuan logistik masih ditemukan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk menganalisis pengelolaan pendistribusian bantuan logistik pada saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari Tahun 2017. Sumber data yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang relevan dan informan, dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, atau *interview* dan catatan lapangan. Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data disajikan dengan

menjelaskan dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi lokasi penelitian. Dimulai dari pengumpulan data (*data collection*) yang relevan dengan tema penelitian, setelah itu dilakukan pemilahan dan penyederhanaan data untuk memfokuskan pada masalah penelitian (*data reduction*), kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks (*data display*) dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan (*concllution drawing and verifying*) dari data yang telah disajikan. Sebagaimana Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

DISKUSI

Hasil

Berdasarkan informasi kejadian awal suatu bencana yang diperoleh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana banjir untuk melaksanakan tugas pengkajian dampak bencana dan memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana banjir. Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat bencana banjir dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala pelaksana BPBD Kota Kendari untuk mengusulkan kepada Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dengan memperhatikan usulan dari Kepala Pelaksana BPBD tersebut di atas, Walikota Kendari menetapkan status/tingkatan bencana skala Kota. Dalam rangka penanganan darurat bencana Banjir di Kota Kendari tersebut, maka Pemerintah Kota Kendari telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dengan SK. Nomor: 609 Tahun 2017, dan membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana banjir dengan SK. Nomor: 610 Tahun 2017. Masa tanggap darurat bencana banjir dalam rangka penanganan darurat berlangsung selama 14 (empat belas) hari, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 13 Juni 2017. Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kendari untuk menindaklanjuti situasi darurat bencana banjir terutama sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tanggap darurat.

Salah satu komponen atau unsur utama pengelolaan tanggap darurat adalah pelaksanaan sistem logistik bencana. Sektor logistik bencana di Kota Kendari bertugas untuk memfasilitasi kebutuhan bagi penduduk di wilayah terdampak bencana. Bersama-sama dengan penduduk setempat, sektor ini melakukan tugas untuk mendistribusi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencana banjir di Kota Kendari pada Tahun 2017 berlandaskan pada Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, yang sudah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku diganti dengan Perka BNPB No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik. Pada peraturan tersebut, menyatakan bahwa sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah pengelolaan logistik dan peralatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian dan penghapusan yang dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan bencana banjir di kota kendari tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari saja, akan tetapi dibutuhkan aktor-aktor lain yang ikut berpartisipasi untuk terlibat membantu penanggulangan bencana. Koordinasi dan kerjasama yang dijalin antar *stakeholder* tersebut dapat memperlancar terlaksananya mekanisme pendistribusian bantuan logistik bagi korban secara efektif dan efisien. Di sini untuk manajemen atau pengelolaan ada unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

1) Perencanaan

Untuk kesuksesan suatu proses maka perlu adanya suatu konsep perencanaan strategis dan perencanaan implementasi (rencana aksi) yang jelas. Implementasi perencanaan merupakan aplikasi atau aksi dari perencanaan strategis. Perencanaan dalam pengelolaan bencana di Kota Kendari merupakan perencanaan sektoral yang ditunjukkan untuk mencapai penanganan bencana banjir yang dapat melindungi korban terdampak dari dampak bencana.

Rencana operasi penanganan darurat bencana merupakan tahapan penting dalam penanganan darurat bencana yang perlu mendapat perhatian agar operasi darurat bencana dapat diselenggarakan secara efektif. Rencana Operasi memuat tujuan, tindakan-tindakan taktis/teknis dan manejerial serta inventarisasi potensi sumberdaya yang ada. Menurut Lestari (2007) Perencanaan sektoral terdiri atas; (1) Sektor manajemen dan koordinasi atau komunikasi (2) Sektor kesehatan (3) Sektor sarana prasarana (4) Sektor logistik. Mengingat penelitian ini menyangkut pengelolaan logistik bencana maka penulis hanya menjelaskan sektor logistik meliputi sasaran dan kegiatan.

Lembaga badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari bekerja sama dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Pemerintah Kecamatan untuk melancarkan pengelolaan pendistribusian bantuan bagi korban bencana banjir serta mengambil langkah-langkah yang baik untuk menangani bencana banjir yang terjadi, koordinasi antar *stakeholders* yang terlibat tersebut dinilai memenuhi apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi terkait.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor logistik, penerimaan dan penyaluran bantuan seperti yang termuat dalam rencana operasi tanggap darurat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Para Pelaku dan Kegiatan Sektor Logistik

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi pos sektor logistik penerimaan dan penyaluran bantuan - Inventarisasi dan klasifikasi bantuan berdasarkan pemetaan kebutuhan - Memberikan tugaskan kepada personil yang tersedia sesuai dengan tugasnya masing-masing - Mendirikan kegiatan dapur umum di tempat pengungsian - Menyediakan dan mengorganisir relawan dalam penyaluran bantuan dan dapur umum 	<p>BPBD Kota Kendari,</p> <p>Dinsosnaker, TNI, POLRI, Satpol PP, Tagana, PMI</p>	Dinsosnaker	1x24 jam setelah bencana terjadi hingga masa tanggap darurat berakhir
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan klaster lainnya dalam rangka merekapitulasi data kebutuhan logistik serta pendistribusian bantuan - Menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pangan, sandang dan papan kepada masyarakat terdampak secara tepat, cepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan - Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan penyaluran bantuan agar tepat sasaran - Membuat dokumentasi atau catatan kronologis penyaluran bantuan kepada korban bencana/masyarakat terdampak di lokasi bencana - Menyediakan personil untuk bongka/muat dan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing klaster. - Menyelenggarakan administrasi penerimaan 		BPBD	

	dan penyaluran bantuan – Menyediakan gudang untuk penerimaan bantuan	
3.	– Menjamin keamanan proses penyaluran bantuan di lokasi bencana secara cepat dan tepat sasaran	TNI, POLRI SATPOL PP
4.	– Melakukan pemeriksaan bantuan yang diterima sebelum didistribusikan	BPOM,
5.	– Melakukan pendataan atau pencatatan bantuan korban bencana berupa uang oleh pihak keuangan (bank) yang terkait.	DPKA

Sumber: Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana Banjir Kota Kendari 2017

Sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada pasal 40 bahwa tujuan dan sasaran penanganan darurat bencana secara garis besar meliputi tindakan-tindakan untuk:

- 1) Penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 3) Penyediaan dan distribusi personil, logistik dan peralatan;
- 4) Perlindungan kelompok rentan;
- 5) Pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital.

Adapun sasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya dukungan logistik yang dibutuhkan atau diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat.
- 2) Tersedianya personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerimaan dan penyaluran bantuan kepada korban.
- 3) Tersedianya mekanisme kerja yang baik, terarah dan teratur yaitu tersedianya pemetaan kebutuhan dan pendistribusian bantuan yang cepat, tepat sasaran dan merata.
- 4) Terdatanya jumlah, jenis dan sumber bantuan bencana yang diterima oleh instansi/OPD/Sektor dan pihak lain.
- 5) Tersalur dan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi masyarakat terdampak di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan mekanisme penerimaan dan pendistribusian bantuan korban.
- 6) Terselenggaranya pengawasan, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sesuai dengan prosedur yang disepakati dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
- 7) Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinergisitas antar sektor dalam penanganan tanggap darurat.

2) Koordinasi

Hasil wawancara mengemukakan berbagai langkah koordinasi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan logistik antara lain sebagai berikut:

- 1) Rapat koordinasi terkait penyelarasan pendapat dan data terkait penanganan bencana banjir Kota Kendari yang dihadiri Wali Kota Kendari, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, OPD di Wilayah Kota Kendari, TNI-POLRI dan NGO.
- 2) Pembuatan Keputusan Distribusi Bantuan Logistik ke Masyarakat terdampak oleh Dinas Sosial didasarkan pada hasil kajian cepat dan pemantauan terus menerus tim tagana di lapangan sejak tanggal 31 Mei 2017.
- 3) TNI dengan jejaring dari Korem mengumpulkan data korban, rumah rusak, dan pengungsian. Melaporkannya data dan kebutuhan bantuan ke Posko PDB Kota dan Posko Induk PDB sejak tanggal 31 Mei 2017.
- 4) BPBD Kota Kendari segera mendirikan Posko di halaman Kantor Wali Kota Kendari pada Tanggal 31 Mei 2017, TRC BPBD Kota Kendari, Tagana Dinas Sosial Kota Kendari dan

- PMI Kota Kendari bergerak cepat kelapangan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan jejaring Kampung Siaga Bencana di Kota Kendari, setelah mendapatkan data dampak bencana banjir bahwa telah mengakibatkan sejumlah rumah penduduk tergenang banjir dan bahkan hancur diterjang tanah longsor
- 5) BPBD Kota Kendari bersama-sama dengan penduduk setempat melakukan distribusi logistik ke lapangan berdasarkan informasi yang diterima Pusdalop BPBD Kota Kendari. Pusdalop BPBD Kota Kendarimenerima informasi dan meneruskan informasi kebutuhan ke anggota pusdalop dan Pusdalop BPBD Kota Kendarijuga membuat laporan harian kepada Kepala BPBD Kota Kendari.
 - 6) Sektor kesehatan bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada korban bencana baik pada saat terjadi banjir dan tanah longsor sampai situasi darurat berakhir. (Wawancara 15 Februari 2019)

3) Pelaksanaan

Pendistribusian bantuan logistik oleh lembaga BPBD Kota Kendari berdasarkan pada Perka BNPB No. 18 Tahun 2010 agar dalam setiap perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian dan penghapusan mencapai tujuan dan sasaran. Ada berbagai jenis logistik dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban bencana banjir Kota Kendari. Jenis dan bantuan logistik yang disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana dapat di klasifikasi ke dalam kelompok sandang, pangan dan papan. Berikut ini data kebutuhan sektor logistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Kebutuhan Sektor Logistik Bencana Banjir Kota Kendari 2017

No	Kebutuhan	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Tersedian	Kurang	Sumber kebutuhan
1.	Relawan	orang	120	241	0	KSB, TAGANA, PMI, Pramuka Peduli, TNI/POLRI, SATPOL PP, ORARI, RAPI, MAPALA Kota Kendari.
2.	Kendaraan roda 6	unit	6	6	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
3.	Kendaraan roda 4	unit	12	12	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
4.	BBM	liter/hari	1050	1050	0	SPBU
5.	Tenda Pengungsian	unit	12	12	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
6.	Tenda dapur umum	unit	6	6	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
7.	Tenda Posko	unit	6	6	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
8.	Tenda kesehatan	unit	6	6		TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
9.	Genset	unit	6	2	4	BPBD
10.	Peralatan dapur umum (1 paket)	unit	6	6	0	DINSOS, BPBD, TNI, POLRI
11.	Beras	kg/7 hari	7397.6	0	7397.6	DINSOS
12.	Lauk Pauk					
13.	Pakaian	stel	5284	0	5284	DINSOS, BPBD
14.	Minyak Goreng	liter/7 hari	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
15.	Minyak Tanah	liter/7 hari	1056	0	1056	DINSOS, BPBD

16.	Tikar	buah	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
17.	Selimut	lembar	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
18.	Famili Kit	set	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
19.	Food ware	set	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
20.	Kid ware	set	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
21.	Pembalut wanita	bungkus (isi 6)	2037	0	2037	DINSOS, BPBD
22.	Pampers lansia	bungkus (isi 6)	161	0	161	DINSOS, BPBD
23.	Gula	liter/7	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
24.	Teh	dus	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
25.	Kopi	Bukus (600 gram)	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
26.	Ember	unit	528	0	528	DINSOS, BPBD
27.	Kain Sarung	lembar	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
28.	Jerigen Plastik (20 L)	unit	528	0	528	DINSOS, BPBD
29.	Mie Instant	dos	1387	0	1387	DINSOS, BPBD
30.	Telur	rak	616	0	616	DINSOS, BPBD
31.	Sarden	kaleng	7392	0	7392	DINSOS, BPBD
32.	Air Mineral	dos	3082	0	3082	DINSOS, BPBD
33.	Baskom	unit	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
34.	Pisau	unit	528	0	528	DINSOS, BPBD
35.	Kompor	unit	528	0	528	DINSOS, BPBD
36.	Seragam Sekolah	stel	1014	0	1014	BPBD, DINSOS, DIKNAS
37.	Alas kaki (sandal/ sepatu)	set	2642	0	2642	BPBD, DINSOS
38.	Pakaian perlengkapan ibadah	stel	1057	0	1057	BPBD, DINSOS
39.	Kruk (penyangga utk korban cacat)	unit	10	0	10	BPBD, DINSOS
40.	Tempat sampah	drum	53	0	53	BPBD, PU, DLH

Sumber: Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana Banjir Kota Kendari 2017

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan kepada BPBD Kota Kendari yang terdampak bencana banjir 2017, tentang sumber logistik untuk masyarakat, penulis memperoleh informasi atau jawaban yang tidak jauh berbeda, bahwa logistik dan bantuan untuk masyarakat korban bencana banjir secara resmi di peroleh dari pihak pemerintah. Selain dari pemerintah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya sumber logistik dan bantuan bagi masyarakat korban bencana juga diperoleh dari lembaga non pemerintah/dunia usaha, organisasi dan perorangan. Saat penulis meminta data kepada para responden tentang siapa saja yang ikut andil dalam memberikan bantuan logistik dan apa saja jenis logistik dan bantuan yang diberikan, para responden kesulitan untuk menunjukan data karena ada banyak sekali bantuan yang diberikan kepada korban bencana yang tanpa melalui posko pemerintah, tetapi langsung diberikan kepada pemerintah kecamatan setempat, bahkan ada juga yang langsung ke posko pengungsian.

Di lain pihak berdasarkan temuan lapangan mengenai logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir Kota Kendari untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandan, pangan dan turunannya serta bentuk alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana banjir pihak Dinas Sosial Kota Kendari juga menyalurkan bantuan. Sumber logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Kendari yang teridentifikasi di lapangan antara lain berasal dari bantuan pemerintah, bantuan organisasi non pemerintah, dunia usaha, dan para donatur (personal maupun kelompok).

Tabel 3 Daftar Permintaan Barang Persediaan Untuk Tanggap Darurat
 Bencana Alam Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2017

No	Jenis Barang	Satuan	Banyaknya Permintaan/Kebutuhan
1.	Lauk Pauk		
	Lauk Pauk Paket A	Kg	150
	Lauk Pauk Paket B	Kaleng	100
	Lauk Pauk Paket C	Kaleng	100
	Lauk Pauk Paket D	Kaleng	100
	Indomie	Dus	400
2.	Sandang		
	Selimut	Lembar	200
	Seragam SD (Wanita)	Pasang	100
	Seragam SD (Pria)	Pasang	100
	Seragam SMP (Wanita)	Pasang	100
	Seragam SMP (Pria)	Pasang	100
	Seragam SMA (Wanita)	Pasang	100
	Seragam SMA (Pria)	Pasang	100
3.	Paket		
	Famili kit	Paket	200
	Food Ware	Paket	100
	Kids Ware	Paket	100
	Paket Ibu Hamil	Paket	100
4.	Alat Evakuasi		
	Tenda Gulung	Lembar	100
	Tenda Keluarga	Unit	5
	Velbed	Unit	20
	Tenda Peleton	Unit	5
	Tenda Regu	Unit	5
	Matras	Lembar	200

Sumber: Data sekunder Dinas Sosial Kota Kendari, 2019

Proses penanganan darurat bencana banjir Kota Kendari, untuk dapat mengadakan bantuan logistik ataupun pendistribusiannya di lokasi terdampak di perlukan dana yang begitu besar. Terkait pendanaan untuk bantuan logistik yang disalurkan kepada masyarakat terdampak dalam penanganan darurat bencana banjir Kota Kendari, sebagian besar dana yang digunakan untuk bantuan logistik termaksud pendistribusiannya bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

4) Evaluasi

Proses penanganan darurat bencana penggunaan dana tidak terlepas dari pengawasannya. Meskipun dalam masa darurat bencana, tidak berarti penggunaan dana dan bantuan logistik yang diterima oleh BPBD Kota Kendari tidak dilakukan pengawasan. Selama proses pelaksanaan penanganan darurat, ada tim dari Inspektorat daerah yang turut melakukan kontrol atau mengawasi dan melakukan pendampingan penggunaan dana, logistik ataupun bantuan yang diterima sehingga dalam prosesnya dapat terlaksana secara akuntabel atau dapat

dipertanggungjawabkan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari menyatakan bahwa: “Dalam pengelolaan dana dan bantuan logistik dalam penanganan darurat bencana banjir dikontrol oleh inspektorat daerah”. (Suhardin, wawancara 15 Februari 2019).

3.2 Pembahasan

Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu kota yang memiliki potensi bencana geologi dan hidrometeorologi yang cukup tinggi. Beberapa bencana tersebut antara lain: gempa bumi, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, gelombang ekstrem dan abrasi. Bencana Banjir yang terjadi di Kota Kendari pada Tahun 2017 telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, antara lain pengungsian di sejumlah kelurahan, bahkan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu perlunya upaya yang serius untuk menangani dampak bencana banjir secara efektif, efisien dan terpadu. Untuk mewujudkan penanggulangan bencana khususnya kegiatan tanggap darurat secara efektif, efisien dan terpadu diperlukan langkah-langkah untuk mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan para pihak yang terlibat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip utama antara lain. kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi dan non proselitasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai institusi/lembaga yang diberikan mandat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah bertugas untuk melaksanakan, memfasilitasi kegiatan manajemen dan mengkoordinasikan kepada para pihak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu instansi yang melaksanakan penanggulangan bencana yang ada di Kota Kendari salah satunya penanggulangan bencana banjir. Dalam hal ini, penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tersebut ialah penanganan darurat bencana. Penanggulangan bencana banjir pada masa tanggap darurat dimaksudkan agar dapat meminimalisir atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kenyamanan serta keamanan warga dalam bertempat tinggal. Pentingnya penanggulangan bencana banjir tersebut peneliti menganalisis pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana di Kota Kendari Tahun 2017.

Dari hasil penelitian mengenai pengelolaan tanggap darurat bencana banjir yang dilaksanakan di Kota Kendari telah berjalan akan tetapi belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di Kota Kendari. Permasalahan yang terjadi yaitu:

1) Keterbatasan sumber daya logistik dan peralatan

Pelaksanaan manajemen bencana, kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kota adalah keterbatasan logistik. Akibat keterbatasan logistik tersebut menyebabkan penanggulangan bencana pada saat darurat bencana menjadi terhambat dan tidak maksimal dalam melaksanakan manajemen bencana yang baik.

2) Kurangnya sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah ditugaskan dalam penanggulangan bencana. Para anggota dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari memerlukan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai dan mendukung penyelenggaraan penanggulangan kegiatan tanggap darurat khususnya dalam pendistribusian logistik. Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana sesuai

dengan prosedur atau ketentuan dan mendapatkan hasil yang baik dan optimal. Sedangkan untuk kuantitas SDM dapat memberikan pelaksanaan kerja yang lebih luas sehingga pelaksanaan suatu kegiatan khususnya pada masa tanggap darurat dapat berjalan sesuai dengan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3) Keakuratan informasi

Kendala selanjutnya yang dihadapi dalam Penanggulangan Bencana khususnya dalam penanganan darurat bencana di Kota Kendari alah kurang akuratnya informasi atau data yang didapat dari keterangan yang ada di lapangan atau lokasi bencana banjir. Data yang kurang akurat menyebabkan penanganan bencana banjir yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena biasanya informasi yang datang dari lokasi bencana banjir adalah data primer yang langsung diberikan tindakan oleh BPBD Kota Kendari. Kurang akuratnya data yang diperoleh menyebabkan Badan Penanggulangan Bencana untuk menyiapkan rencana anggaran dan program kerja yang akan dilakukan di masa mendatang.

4) Keterbatasan anggaran

Kendala yang terakhir dan memang biasa terjadi di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu kurang optimalnya dana yang didapat atau dimiliki, dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari yang juga memiliki keterbatasan dana dalam penanggulangan bencana banjir di Kendari. Minimnya anggaran untuk operasional dan penyediaan personil kedaruratan untuk membantu tugas di lapangan pada saat bencana banjir terjadi dapat menghambat jalannya penanganan darurat.

KESIMPULAN

Pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencana pada saat tanggap darurat di Kota Kendari Tahun 2017 mengacu pada Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Distribusi kepada masyarakat dilaksanakan ketika instansi penyalur memiliki stok bantuan sesuai kebutuhan korban terdampak. Titik-titik pendistribusian ditentukan berdasarkan perencanaan operasi (penilaian kebutuhan) yang telah ditetapkan oleh Komando Tanggap Darurat dan dapat didukung oleh lembaga yang terlibat dalam Klaster Logistik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala sumbangsih, bantuan dan kontribusi yang diberikan semua pihak, terutama kepada Dr. Ir. Eko Teguh Peripurno, Dr. Johan Danu Prasetyo, S.Kel., M.Sidan semua pihak BPBD Kota Kendari dan Dinas Sosial Kota Kendari yang telah mengijinkan melakukan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Badri, M., 2008, "*Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul)*", Tesis Sekolah Pascasarjana ITB.
- Kasim, S., Imran, T., Guni A., Zainal A. I., 2017. *Laporan Penilaian Ketangguhan Kota Kendari 2017*. Kendari: USAID APIK dan Perkumpulan Lingkar.
- Nurjanah, R. Sugiharto, Kuswanda D., Siswanto dan Adikoesoemo, 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.

- Sahilala, I. M., Sarwono dan Hanafi I., 2015. *Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris Pada Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 3, No. 5.
- Sukandarrumidi, 2010. *Bencana Alam dan Bencana Anthropogene*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Zaroni, 2017. *Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana (Bagian #1)*. Supply Chain Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik.
- Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana